

## **FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PENERBITAN PAS KECIL DAN KESEMPURNAAN KAPAL DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA**

**Lisda Van Gobel & Arman Aligi**  
STIA Bina Taruna Gorontalo

[lisdavangobel69@gmail.com](mailto:lisdavangobel69@gmail.com)<sup>1</sup> & [bukujurnalstia@binataruna.ac.id](mailto:bukujurnalstia@binataruna.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian deskripsi kualitatif dengan menggunakan tehknik pegimputan data yaitu observasi dan wawancara mendalam kepada sejumlah informan dan melakukan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi standar kelayakan kapal seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin kapal yang sering belum sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal, sehingga hal itu menghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Dari segi pendukung keselamatan kapal yang berada di kapal nelayan sering juga belum memenuhi syarat, seperti ban pelampung, jaket pelampung, sekoci, radio komunikasi, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan salah satu penghambat dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, Dari segi administrasi kepemilikan kapal nelayan belum memenuhi syarat atau belum dipenuhi dalam hal ini surat kepemilikan kapal dari pemerintah desa setempat yang menjelaskan asal usul dan tahun pembuatan kapal yang tidak diketahui oleh pemiliknya, surat jual beli, foto copy ktp pemilik kapal, serta surat ukur kapal dari syahbandar, sehingga hal itu menghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Sebagian besar pemilik kapal belum memiliki standar kelayakan kapal, pendukung keselamatan, dan administrasi kepemilikan kapal sehingga hal itu menyebabkan penghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.

**Kata Kunci: Penerbitan, Pas Kecil, Kapal**

---

### **PENDAHULUAN**

Komitmen pemerintahan baru Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Yusuf Kalla, tentang visi yang akan menjadikan Indonesia

suatu “Poros Maritim” dunia, pada dasarnya adalah suatu komitmen politik. Komitmen politik tersebut tidak lain adalah implementasi geopolitik Indonesia yang didasarkan pada kenyataan atas

konfigurasi NKRI serta posisi geografisnya yang berbentuk negara kepulauan dan berada di posisi silang dunia. Dengan jiwa besar kita harus mengatakan bahwa Geopolitik yang dijabarkan kedalam Geostrategi Indonesia tersebut telah terabaikan selama berpuluh-puluh tahun, sehingga Indonesia tak dapat mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari keadaan itu untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran bangsa dan rakyat Indonesia. Pernyataan ini bukan berarti bahwa tidak ada sama sekali pembangunan sektor maritim dan kelautan dimasa lalu, akan tetapi hanya karena belum dilakukan secara maksimal karena arah pembangunan kita selalu bervisi kontinental. Potensi maritim negara kita sungguh besar dalam arti kekayaan sumber daya alam serta potensi sumber daya buatan seperti infrastruktur maritim yang masih perlu dikembangkan.

Dari berbagai tulisan dimedia maupun mendengarkan berbagai pendapat pengamat maupun masyarakat umum memberi kesan bahwa pemahaman tentang Poros Maritim diartikan secara harafiah, yaitu suatu jalan laut atau jalur perhubungan laut yang membentang mulai dari Aceh sampai Papua. Padahal bila diletakkan dalam kedudukannya dalam proses pengambilan keputusan Nasional maka poros maritim hendaknya diartikan sebagai salah satu sektor pembangunan nasional yang ditunjukkan untuk mencapai Kepentingan Nasional di bidang ekonomi (Umumnya Kepentingan Nasional akan selalu bertumpu pada tiga elemen utama yaitu: Politik, Ekonomi dan Militer). Karena berada

dalam Kepentingan Nasional (National Interest) maka sektor pembangunan ini akan berperan menentukan mati hidup negara ini sehingga harus dipertahankan dengan segala daya upaya, dari segala rongrongan, ancaman, gangguan serta tantangan dan sebagainya. Jadi idealnya, perwujudan Poros Maritim kedepan hendaknya dimasukkan kedalam Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy) yang hakekatnya bermuatan pembangunan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan / keamanan. Dengan demikian diharapkan pembangunan seluruh aspek berbangsa dan bernegara tersebut akan berada dalam satu pengendalian dan koordinasi terpadu dari pemerintah. Indonesia dewasa ini dihadapkan pada berbagai pakta perdagangan baik regional maupun internasional. Contohnya pada tahun 2015 akan diberlakukan zona perdagangan bebas Asean yang dengan sendirinya menuntut Indonesia siap dalam segala aspek untuk menghadapinya. Semua ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, sebab jika tidak, kita hanya akan menjadi arena percaturan bangsa-bangsa lain yang mencari keuntungan dari kita dan kita hanya akan menderita kerugian.

Perdagangan dunia masih sangat tergantung pada angkutan lewat laut menggunakan kapal laut karena kapal laut memiliki berbagai keunggulan dibandingkan sarana angkut lewat medium yang lain. Disamping memiliki kapasitas angkutan yang sangat besar, kapal laut dapat mengangkut berbagai jenis

komoditi baik padat maupun cair, serta orang, keberbagai pelosok dunia dalam jarak dekat maupun jauh menembus hambatan cuaca yang ganas sekalipun. Sejarah telah membuktikan bahwa sejak jaman dahulu kala sampai saat ini, kapal laut telah memainkan peranan besar dalam memajukan dan meningkatkan kemakmuran dan kemajuan bahkan kebudayaan bangsa-bangsa didunia agar perdagangan antar Negara dapat terlaksana dengan sempurna, dimana kapal laut sebagai sarana angkut utama dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka 3 (tiga) komponen utama yang saling terkait satu sama lain harus tersedia yaitu : Sarana angkut (kapal), Alur pelayaran, dan Pelabuhan/ Area pelabuhan. Terlaksana dengan baik dalam arti bahwa sejak kapal memuat barang dan berangkat dari pelabuhan asal, selama dalam perjalanan melewati alur pelayaran, tiba di pelabuhan tujuan dan membongkar muatannya, harus berjalan dengan baik lancar dan aman, begitu kira-kira idealnya. Namun demikian sudah tercatat sejak dahulu kala bahwa ketiga komponen tersebut tidak pernah lepas dari gangguan keamanan dan ancaman keselamatan yang sering kali membawa kerugian besar bagi banyak pihak. Oleh karena itu disusunlah berbagai hukum , peraturan ,ketetapan dibidang maritime khususnya pelayaran berskala internasional yang mengikat semua Negara *maritime* didunia yang bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan kapal dan pelayaran pada umumnya.

Penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif, efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mutlak untuk diwujudkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Direktorat Jenderal memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidangnya, dengan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan kementerian, pelaksanaan kebijakan kementerian, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta pelaksanaan administrasi di bidangnya. Penerapan administrasi yang dimaksudkan dalam bidang perhubungan laut yaitu pas kecil dan keselamatan kapal perlu perhatian khusus pada petugas yang bertugas. Hal itu sangatlah berpengaruh pada tingkat keselamatan kapal dan penumpang itu sendiri, namun selama ini di sebahagian besar bidang perhubungan laut mengalami hambatan-hambatan dalam penerapannya, yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang muncul pada pemilik kapal di pelabuhan Kwandang atau pelabuhan Anggrek dan tidak terkecuali di seluruh Kabupaten Gorontalo Utara dari Tolinggola sampai Atinggola harus mengurus pas kecil dan kesempurnaan kapal. Terutama yang dari luar daerah sekitar 59 kapal atau lebih dianjurkan mengikuti aturan di

Dinas Perhubungan bidang laut Kabupaten Gorontalo Utara .

Di Kabupaten Gorontalo utara khususnya pada Dinas Perhubungan di bidang perhubungan laut dalam hal penanganan kelancaran aktifitas di bidang kelautan termasuk penanganan Kapal laut yang beroperasi di lautan Gorontalo Utara itu ditangani langsung dan kontinyu oleh para petugas yang ada. Contohnya standar kelayakan kapal yang digunakan, dan pendukung keselamatan kapal dan penumpang, serta penanganan terhadap registrasi Pas Kapal di Pelabuhan Kwandang dan Pelabuhan Anggrek, jumlah kapal yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 59 kapal dan kesemuanya beroperasi dimasing-masing wilayah. semua Kapal Laut harus mengadakan pengurusan Pas Kecil dan kesempurnaan tersebut namun kapal yang melakukan pengurusan pas kecil dan kesempurnaan kapal tiap tahun hanya berjumlah 40 kapal. Surat pas kecil ini dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara. Pas kecil dan kesempurnaan kapal diberikan kepada kapal nelayan dan penumpang yang berkapasitas sedang dan besar, pas kecil dan kesempurnaan kapal akan terbit bersamaan, dan para pemilik kapal tidak diperkenankan melakukan kegiatan atau aktifitas sebelum memiliki pas kecil dan keselamatan kapal tersebut. Sebagai mana observasi awal dari peneliti terkait Penerbitan Pas Kecil Dan Keselamatan Kapal di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara Sering menjalani musibah.

Yang menjadi fenomena di pelabuhan anggrek dan pelabuhan kwandang ada beberapa kapal penumpang maupun nelayan yang sering mengalami masalah di saat akan diterbitkannya pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, hal itu diakibatkan oleh standar kelayakan Kapal belum memenuhi apa yang diharapkan, antara lain kualitas mesin yang sudah tua tapi masih digunakan oleh nelayan, dan kapasitas atau ukuran kapal bisa mencapai muatan 7 ton namun ternyata sebahagian besar kapasitas kapal belum sesuai.

Masalah berikut adalah kurangnya alat pendukung keselamatan contoh sekoci, jaket pelampung dan pasilitas radio. Dengan adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada Kapal penumpang dan kapal nelayan yang sering mengalami masalah seperti ketika ada kapal yang tenggelam, seluruh penumpang tidak bisa menyelamatkan dirinya hanya karena dengan adanya keterbatasan peralatan pendukung keselamatan. Misalnya kurangnya pasilitas jaket pelampung, sekoci. hal itu juga menjadi salah satu faktor penghambat Dinas Perhubungan dalam mengeluarkan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang menjadi persyaratan kapal untuk melakukan aktifitas, contoh ban pelampung, *live jacket* dan sikoci penolong, serta peralatan lainnya yang masih kurang, hal ini juga adalah salah satu penghambat untuk diterbitkannya pas kecil kesempurnaan kapal.

Selanjutnya status kepemilikan Kapal juga sangat menentukan terbitnya surat pas kecil dan

kesempurnaan kapal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara, namun pada kenyataannya masih banyak Kapal Laut yang belum memenuhi persyaratan administrasi Kepemilikan Kapal, contoh tahun Pembuatan Kapal harus diketahui oleh pemilik kapal, atau surat jual beli kapal serta identitas pemilik (KTP) atau foto copy KTP Pemilik dan surat ukur kapal dari sahbanda setempat.

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan mencoba mengangkat masalah dengan menetapkan judul penelitian “Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan bidang laut Kabupaten Gorontalo Utara ”

## PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka rumusan permasalahan adalah “Faktor-Faktor apa yang menghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas bidang perhubungan Laut Di Kabupaten Gorontalo Utara?”

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan bidang perhubungan Laut Di Kabupaten Gorontalo Utara.

## Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah dapat menambah pengetahuan tentang permasalahan tentang Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Laut Di Dinas Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Manfaat praktis: Manfaat praktis yang diharapkan kiranya dapat dijadikan sebagai bahan informasi alternatif bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Laut Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas.

Dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah fenomena yang terkait dengan permasalahan Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah: (1) Standar Kelayakan Kapal Yang dimaksud dengan standar kelayakan kapal dalam penelitian ini adalah ukuran mesin dan badan kapal yang digunakan; (2) Pendukung keselamatan Yang dimaksud dengan pendukung keselamatan dalam penelitian ini adalah alat pendukung keselamatan kapal dan para penumpang, contohnya ban pelampung, jaket pelampung dan lain-lain; (3) Administrasi Kepemilikan kapal Yang dimaksud dengan Administrasi Kepemilikan kapal dalam penelitian ini adalah kelengkapan Surat-suratan kepemilikan kapal.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Deskripsi hasil penelitian tentang Faktor-Faktor Penghambat Penerbitan Pas Kecil Dan Kesempurnaan Kapal Di Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara diperoleh melalui kegiatan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dengan sejumlah informan yang diwawancarai secara kualitatif dan hasilnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **1. Standar Kelayakan Kapal**

Yang dimaksud dengan standar kelayakan kapal dalam 59 buah kapal yang terdaftar terdiri dari 3 buah kapal penumpang dan 56 kapal nelayan adalah ukuran mesin dan badan kapal yang digunakan, standar kelayakan kapal sangat penting bagi kapal itu sendiri dalam hal

keselamatan dalam melakukan aktifitas laut.

### **2. Pendukung Keselamatan**

Yang dimaksud dengan pendukung keselamatan dalam penelitian ini adalah alat pendukung keselamatan kapal dan para penumpang, contohnya ban pelampung, jaket pelampung, sekoci, dan radio komunikasi. Namun selama ini pendukung keselamatan tersebut belum dipenuhi oleh beberapa kapal. Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal terletak pada pasilitas pendukung keselamatan kapal seperti ban pelampung, dan jaket pelampung, sekoci, dan radio komunikasi.

### **3. Administrasi Kepemilikan**

Yang dimaksud dengan administrasi Kepemilikan kapal adalah kelengkapan Surat-suratan kepemilikan kapal, contoh adalah surat kepemilikan kapal dari Kepala Desa setempat, surat ukur kapal yang disetujui oleh kepala sahbandar setempat, foto copy Ktp pemilik kapal. Hal itu penting dimiliki oleh pemilik kapal, menunjukkan bahwa kapal tersebut resmi dimiliki oleh seseorang, serta hal itu juga menjadi salah satu persyaratan untuk penerbitan surat pas kecil dan kesempurnaan kapal. Berdasarkan uraian fokus penelitian di atas menunjukkan bahwa standar kelayakan kapal, pendukung keselamatan, dan administrasi kepemilikan kapal adalah faktor-faktor penghambat dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal di

Dinas Perhubungan Kabupaten  
Gorontalo Utara.

### SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian lain, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari segi standar kelayakan kapal seperti ukuran badan kapal, kapasitas daya mesin kapal yang sering belum sesuai dengan ketentuan dalam penerbitan Pas kecil dan kesempurnaan kapal, sehingga hal itu menghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara
2. Dari segi pendukung keselamatan kapal yang berada di kapal nelayan sering juga belum memenuhi syarat, seperti ban pelampung, jaket pelampung, Sekoci, radio komunikasi, sehingga hal-hal tersebut menyebabkan salah satu penghambat dalam penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara;.
3. Dari segi administrasi kepemilikan kapal nelayan belum memenuhi syarat atau belum dipenuhi dalam hal ini surat kepemilikan kapal dari pemerintah desa setempat yang menjelaskan asal usul dan tahun pembuatan kapal yang tidak diketahui oleh pemiliknya, surat jual beli, foto copy ktp pemilik kapal, serta surat ukur kapal dari syahbandar, sehingga hal itu menghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.

4. Sebahagian besar pemilik kapal belum memiliki standar kelayakan kapal, pendukung keselamatan, dan administrasi kepemilikan kapal sehingga hal itu menyebabkan penghambat penerbitan pas kecil dan kesempurnaan kapal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara.

### SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara serta pemilik kapal nelayan yang berada di Pelabuhan kwandang dan anggrek Kabupaten Gorontalo Utara:

1. Dinas Perhubungan khususnya yang membidangi perhubungan laut harus mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh pemilik kapal terkait dengan standar kelayakan kapal yang akan digunakan dalam beraktifitas di laut.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan harus menekan kepada Pemilik-pemilik kapal nelayan untuk bisa melengkapi pendukung keselamatan dalam hal ini ban pelampung, jaket pelampung, sekoci, dan radio komunikasi sebelum melakukan aktifitas di laut sehingga bisa memudahkan dalam penerbitan surat pas kecil dan kesempurnaan kapal;
3. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Gorontalo Utara harus tegas dan memberikan sanksi dengan tidak menerbitkan pas kecil dan

kesempurnaan kapal kepada kapal nelayan dan penumpang yang tidak memenuhi administrasi kepemilikan kapal, seperti tahun pembuatan kapal yang harus diketahui oleh pemilik kapal, surat pembelian kapal yang diketahui oleh Kepala Desa setempat, foto copy Ktp pemilik kapal, serta surat ukur kapal dari syahbandar.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino. 2008. *Implementasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Bengkulu: PT Rineka Cipta.
- Anggara. 2012. *Definisi Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agustino. 2012. *Pengantar Studi Penelitian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Chandler. 2011. *Implementasi Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Dewi. 2013. *Pengantar ilmu Administrasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nigro. 2014. *Teori Adminitrasi Publik*: Alfabeta
- Nugroho. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parsons. 2011. *Perubahan dan Pengembangan Kebijakan Organisasi*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Paul. 2010. *Ilmu Implementasi dan Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Simon. 2012. *Teori Adminisrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Schubert. 2009. *Organization Theory and Design*. Denver: University of Colorado.
- Siagian, S. 2006. *Economic Development*. Seventh Edition, New York University, Addison Mesley.
- Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subarsono. 2011. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Suandi. 2011. *Kemiskinan dan Strategi Kebijakan Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharno. 2011, *Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Usman. 2009. *Sistem Implementasi..* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Winarno. 2010. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- ..... 2010. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahap. 2012. *Kebijakan dan Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dokumen Lainnya:**  
UU No 17 Tahun 2008 Tentang Keselamatan Kapal.  
Peraturan Pemerintah Noor 47 tahun

2009 tentang pembentukan  
organisasi Kementrian Negara.  
Peraturan Buati Gorut Nomor 11  
2014 tentang Pas Kecil dan  
Keselamatan Kapal.